

URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN GLOBAL DALAM KURIKULUM  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI ABAD 21

THE URGENCY OF GLOBAL CIVIC EDUCATION IN THE CURRICULUM OF  
PANCASILA AND CIVIC EDUCATION IN THE 21st CENTURY

Rianda Usmi\*, Samsuri

Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281, Indonesia

INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 27 Februari 2021  
Disetujui : 10 Maret 2022

**Keywords:**

global civic education, curriculum,  
Pancasila and civic education

**Kata Kunci:**

pendidikan kewarganegaraan  
global, kurikulum, pendidikan  
Pancasila dan kewarganegaraan

**\*) Korespondensi:**

E-mail: riandausmi43@gmail.com

**Abstract:** this study aimed to describe the urgency of global civic education, civic education in the Indonesian context, and the conceptual framework of global civic competencies in developing the Pancasila and civic education curriculum. This study used a descriptive qualitative approach with a literature study method through several stages, including collecting library data, taking notes, reviewing data sources, and processing information. The urgency of global citizenship education was to prepare young people who understand the contemporary world, play an active role in solving national and global problems, and become proactive contributors to a more just, peaceful, tolerant, inclusive, safe, and sustainable world. Pancasila and civic education in the Indonesian context did not yet contain material for global civic education. The conceptual framework for global civic in developing the Pancasila and civic education curriculum should include three main elements: global knowledge and understanding, values and attitudes, and global skills.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan urgensi pendidikan kewarganegaraan global, pendidikan kewarganegaraan dalam konteks Indonesia, dan kerangka konseptual kompetensi kewarganegaraan global dalam kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur yang dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi pengumpulan data pustaka, mencatat, mereview sumber data, serta mengolah informasi. Urgensi pendidikan kewarganegaraan global yaitu mempersiapkan generasi muda yang memahami dunia kontemporer, berperan aktif baik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan nasional dan global, serta menjadi kontributor yang proaktif untuk dunia yang lebih adil, damai, toleran, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam konteks Indonesia belum memuat materi pendidikan kewarganegaraan global. Kerangka konseptual kewarganegaraan global dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus meliputi tiga unsur utama yaitu pengetahuan dan pemahaman global, nilai dan sikap, serta keterampilan global.

## PENDAHULUAN

Era globalisasi memberikan dampak kecenderungan yang bersifat global. Globalisasi memberikan perubahan yang cepat dan bersifat multidimensional memunculkan berbagai masalah global yang tidak dapat dihindari seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, serta tantangan transnasional meliputi migrasi, perubahan iklim, xenophobia, rasisme, radikalisme, dan ekstremisme (Franch, 2019). Permasalahan yang timbul di era globalisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu perkembangan ekonomi, kemajuan teknologi dan komunikasi yang semakin pesat, serta populasi penduduk dunia yang semakin meningkat sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan (Cogan, 1998). Kecenderungan yang tidak diinginkan warga negara di era globalisasi meliputi kesenjangan ekonomi, terbukanya privasi individu akibat teknologi informasi, konflik kepentingan antara negara, serta pertumbuhan penduduk (Karsten, Kubow, & Matrai, 1998). Pengaruh globalisasi telah membuat negara-negara di dunia sebagai sistem global yang saling terikat dan bergantung satu sama lain.

Negara Indonesia merupakan bagian dari global yang bersinggungan dan dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi. Permasalahan-permasalahan global akan terjadi dan berdampak dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Sutrisno dkk., 2021). Permasalahan yang terjadi akibat perkembangan globalisasi memerlukan upaya penyelesaian salah satunya melalui bidang pendidikan yang mampu beradaptasi dan memberikan solusi (Nanggala & Malihah, 2020). Pendidikan menjadi penentu keberhasilan dan kemajuan suatu bangsa. Komponen yang harus diperbaiki dalam pendidikan untuk menghadapi perkembangan globalisasi yaitu kurikulum harus disesuaikan, pengetahuan-pengetahuan harus dikembangkan, dan keterampilan-keterampilan global harus diakomodasi (Yusof dkk., 2019). Pendidikan menjadi upaya strategis untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam mengatasi permasalahan bangsa akibat pengaruh globalisasi.

Penyelesaian masalah akibat pengaruh globalisasi dalam bidang pendidikan salah satunya melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). PPKn sebagai mata pelajaran formal yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari warga negara sehingga

tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan global (Wibowo & Wahono, 2017). PPKn dalam mengatasi permasalahan globalisasi harus direvitalisasi ulang agar dapat mendidik dan mencetak warga negara yang memiliki peran untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik (Banks, 2014). Mata pelajaran PPKn di abad 21 memerlukan perspektif baru yang bertujuan untuk pemahaman global (Titus, 1994). PPKn sebagai sudut pandang baru diharapkan dapat memberikan solusi dalam mengatasi masalah di era globalisasi.

PPKn memiliki peranan yang strategis untuk mempersiapkan warga negara global. Mata pelajaran PPKn dalam konteks pendidikan di Indonesia seharusnya mampu dan sesuai dengan tantangan zaman. Hal ini dapat diartikan bahwa kompetensi akademik kurikulum PPKn harus dilakukan pengembangan yang berorientasi pada pendidikan kewarganegaraan global. PPKn dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik dengan pengetahuan terkait isu-isu global, budaya global, sistem dan lembaga internasional (Murdiono, Suharno, & Wuryandani, 2020). Perubahan kurikulum PPKn bertujuan agar peserta didik di sekolah mempunyai pemahaman global yang memadai dan mampu menghadapi segala tantangan dan perubahan di era globalisasi abad 21.

Kurikulum PPKn di Indonesia belum menetapkan secara resmi terkait kompetensi pendidikan kewarganegaraan global. Istilah pendidikan kewarganegaraan global masih jarang ditemui dalam praktik PPKn pada setiap jenjang pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa kompetensi dan cakupan materi PPKn masih mencakup substansi yang umum dalam skala nasional. Kompetensi dan ruang lingkup materi PPKn pada jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas meliputi (a) Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup, dan dasar negara, (b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi landasan konstitusional dan hukum dasar negara, (c) NKRI sebagai konsensus dasar dan final sebagai bentuk negara Indonesia, dan (d) Bhinneka Tunggal Ika sebagai filosofi dan alat persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dinamika perubahan nomenklatur mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

(PKn) menjadi PPKn pada kurikulum Tahun 2013 menggambarkan cakupan materi yang masih umum dan belum memuat kebijakan yang menetapkan pendidikan kewarganegaraan global.

Mata pelajaran PPKn dalam konteks pendidikan nasional di Indonesia berbeda dengan negara Eropa, Amerika, Australia, dan Asia yang telah menetapkan pendidikan kewarganegaraan global dalam kurikulum pendidikan nasionalnya. Negara Hongkong telah memperkenalkan pendidikan kewarganegaraan global dalam kurikulum sekolah menengah sejak Tahun 1998 dengan tujuan untuk mempromosikan kesadaran akan masalah-masalah transnasional, membantu siswa berpikir lebih global, serta membentuk warga dunia yang baik (Chong, 2015). Pemerintah Negara Taiwan telah mempromosikan pendidikan kewarganegaraan global dalam kurikulum sejak Tahun 2001 yang bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan nilai-nilai global seperti saling ketergantungan sosial, rasa saling percaya, memperoleh pengetahuan tentang masalah internasional, serta melihat dunia sebagai kampung global. Negara China telah merevisi kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada pengembangan perspektif global untuk mempersiapkan warga negaranya agar terintegrasi dengan dunia global (Ho, 2018). Pendidikan kewarganegaraan global telah direalisasikan oleh negara-negara maju di dunia sebagai bentuk dalam merespon globalisasi.

Kondisi dan dinamika kehidupan di era globalisasi abad 21 menjadi refleksi kurikulum PPKn akan pentingnya pendidikan kewarganegaraan global sebagai jawaban atas permasalahan dan tantangan-tantangan global. Kajian teori dan pendekatan pembelajaran PPKn di Indonesia perlu dilakukan pengembangan sesuai dengan tuntutan zaman agar mampu mempersiapkan generasi muda yang memiliki pemahaman global. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini akan membahas terkait (1) urgensi pendidikan kewarganegaraan global, (2) pendidikan kewarganegaraan dalam konteks Indonesia, dan (3) kerangka konseptual kompetensi pendidikan kewarganegaraan global dalam kurikulum PPKn.

## METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur. Kegiatan yang harus dilakukan dalam melakukan studi

literatur yaitu mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah informasi sesuai dengan pembahasan (Wibowo & Wahono, 2017). Prosedur dalam kajian studi literatur ini dilakukan dengan mengumpulkan data pustaka, membuat catatan, mereview sumber data yang telah diperoleh, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Sumber data dalam kajian ini berupa data primer yang diperoleh dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan global maupun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan peninjauan dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Global

Pendidikan kewarganegaraan global sebagai daya tarik baru di tengah dinamika globalisasi yang melahirkan keterikatan dan ketergantungan antara bangsa-bangsa. Konsepsi pendidikan kewarganegaraan global mulai berkembang pada Tahun 1990 (Franch, 2019). Hadirnya pendidikan kewarganegaraan global akibat meningkatnya masalah-masalah global yang semakin tidak terhindarkan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan tantangan-tantangan transnasional. Pendidikan kewarganegaraan global muncul akibat kecenderungan khusus yaitu pembangunan kewarganegaraan, masalah-masalah global, identitas global, dan hak asasi manusia yang universal (Davies & Ross, 2018). Pendidikan kewarganegaraan global memiliki urgensi yang penting dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internasional akibat pengaruh globalisasi.

Pendidikan kewarganegaraan global telah menjadi inisiatif kebijakan internasional terkemuka. *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada Tahun 2013 memberlakukan kewarganegaraan global sebagai salah satu pendidikan yang diberikan kepada pelajar (Kiwani, 2018). UNESCO mengampanyekan pendidikan kewarganegaraan global dengan mengembangkan konsepsi dengan misi belajar untuk hidup bersama. UNESCO pada agenda konsultasi teknis pendidikan di Seoul dan Bangkok menghasilkan publikasi kerangka kerja berupa panduan kurikulum internasional untuk semua fase usia dan jenjang pendidikan baik formal maupun non formal. Kurikulum internasional yang dipublikasikan UNESCO

digunakan sebagai panduan pedagogis bagi negara-negara di seluruh dunia untuk mengintegrasikan dan meningkatkan pendidikan kewarganegaraan global ke dalam sistem pendidikan nasional (Toukan, 2018). Pendidikan kewarganegaraan global dipublikasikan oleh UNESCO sebagai upaya untuk mempersiapkan pelajar menghadapi tantangan abad 21.

Pendidikan kewarganegaraan global bertujuan untuk menghadapi tantangan dan permasalahan global. Hakikat dari pendidikan kewarganegaraan global yang dimuat dalam publikasi kurikulum internasional UNESCO yaitu memberdayakan peserta didik untuk ikut andil dan berperan aktif menciptakan perdamaian, keamanan, keadilan, toleran, inklusif, dan berkelanjutan baik pada tingkat lokal maupun global (Pashby, 2018). Pendidikan kewarganegaraan global menekankan pada perasaan kemanusiaan yang sama dan komunitas, serta saling ketergantungan ekonomi, politik, dan sosial budaya (Cotton dkk., 2019). Pendidikan kewarganegaraan global bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman peserta didik terkait masalah dan rasa memiliki terhadap komunitas global (Sundaram, 2018). Pendidikan kewarganegaraan global memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengeksplorasi, membayangkan, memahami, dan bertindak sebagai warga dunia baik di tingkat lokal, nasional, maupun global (Soong, 2018). Pendidikan kewarganegaraan global membekali peserta didik menjawab berbagai pengaruh globalisasi.

Urgensi pendidikan kewarganegaraan global dapat dilihat dari relevansi dan tujuan penerapannya. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan global yaitu (a) mendorong siswa untuk mengembangkan kesadaran diri atas konektivitas dan tanggung jawab agar menjadi warga negara yang aktif dengan hati nurani global, serta (b) membentuk warga negara yang sadar akan pemahaman kritis tentang globalisasi, terlibat di dalam masalah lokal maupun global, dan sadar akan peran untuk masa depan dengan terlibat dalam tindakan konstruktif mempromosikan perubahan-perubahan sosial baik tingkat lokal, nasional, regional, dan global (Franch, 2019). Pendidikan kewarganegaraan global bertujuan untuk mempersiapkan warga negara yang baik dengan dibekali keterampilan dalam komunitas dunia yang terglobalisasi (Kiwani, 2018). Pendidikan kewarganegaraan global

secara eksplisit bertujuan untuk memperbaiki situasi ketidaksetaraan ekonomi, politik, dan budaya global.

Pendidikan kewarganegaraan global sangat penting diterapkan di abad 21. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan global karena menempatkan keprihatinan pada keadilan sosial, toleransi, keberagaman, dan martabat manusia (Davids, 2018). Pendidikan kewarganegaraan global dapat mendorong seluruh manusia untuk hidup bersama secara kolaboratif dalam menghadapi tantangan-tantangan dari pengaruh globalisasi. Idealnya dampak globalisasi perlu direfleksikan agar memiliki berbagai kemanfaatan khususnya bagi terwujudnya *civic engagement* generasi muda (Nanggala & Malihah, 2020). Dimensi kewarganegaraan global sangat penting dikembangkan dalam pembelajaran kewarganegaraan di sekolah untuk membangun wawasan global generasi muda (Sutrisno dkk., 2021). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan global di abad 21 membekali peserta didik agar mampu menjadi warga negara global yang cerdas dan berkarakter.

Pentingnya kewarganegaraan global juga dapat dimaknai dari penyikapan oleh berbagai negara di belahan dunia yang telah menerapkannya dalam kebijakan nasional pendidikan. Negara Australia menempatkan pendidikan kewarganegaraan global sebagai disiplin ilmu tersendiri dan prioritas utama dalam pendidikan di sekolah (Peterson, Milligan, & Wood, 2018). Orientasi pendidikan kewarganegaraan global di Australia tidak hanya menekankan pada permasalahan global, tetapi juga berpartisipasi dalam komunitas lokal, nasional, dan global. Fokus pendidikan yang berorientasi pada literasi kewarganegaraan juga telah dirancang oleh Negara Kanada untuk mempromosikan keterlibatan aktif warga negara pada isu-isu global (Pashby, 2018). Pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat telah mencakup pendidikan kewarganegaraan global di samping pendidikan hak asasi manusia (Fernekes, 2016). Pendidikan kewarganegaraan global dalam negara-negara maju di dunia berorientasi membekali wawasan global kepada peserta didik.

Pendidikan kewarganegaraan global juga telah diterapkan di sebagian besar negara-negara maju di Asia seperti Hong Kong, Taiwan, dan China. Penambahan isu-isu global sudah menjadi bagian dari kurikulum sekolah di negara-

negara Afrika dan Amerika Latin (Eten, 2015). Pendidikan kewarganegaraan di Amerika Latin pada awalnya sangat berkaitan dengan polarisasi politik, tetapi seiring perkembangannya berubah menuju perspektif kewarganegaraan global dan cosmopolitan. Pendidikan kewarganegaraan global di Amerika Latin berorientasi pada keseimbangan antara bentuk langsung dari partisipasi dan representasi, menekankan pengakuan keragaman budaya di dalam dan di luar batas negara-bangsa, serta mengedepankan kesetaraan gender (Exposito & McCowan, 2013). Konsepsi dan praktik pendidikan kewarganegaraan global di berbagai negara sangat penting dalam rangka mempersiapkan warga negara muda yang menguasai kompetensi, keterampilan, dan mampu menjawab tantangan serta permasalahan abad 21.

Pendidikan kewarganegaraan global menjadi konsep dalam wacana kebijakan pendidikan abad 21 untuk membentuk peserta didik yang memahami dunia kontemporer dan berperan di dalamnya. Pengembangan kajian kewarganegaraan global patut dikembangkan dalam kurikulum PPKn di Indonesia. Kewarganegaraan tidak bisa lepas dari tingkat artikulasinya yaitu nasional, internasional, dan global (Mansouri, Johns, & Marotta, 2017). Kewarganegaraan global telah menjadi perspektif baru pendidikan kewarganegaraan di abad 21 sehingga sudah saatnya memahami kewarganegaraan yang bercita-cita dan bermanfaat untuk dunia dengan tetap mengembangkan kewarganegaraan nasional (Franch, 2019). Pendidikan kewarganegaraan global bertujuan agar warga negara dapat memiliki pengetahuan luas, terhubung secara sosial, menghormati keragaman, bertanggungjawab secara etika, dan terlibat aktif dalam permasalahan nasional dan juga internasional.

### **Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia**

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mengalami dinamika seiring dengan berkembangnya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks Indonesia diatur dalam perubahan terakhir yaitu kurikulum pendidikan nasional Tahun 2013 yang menetapkan nomenklatur PPKn (Winataputra, 2014). PPKn dalam konteks Indonesia memiliki relevansi untuk pengembangan pendidikan kewarganegaraan global. Konteks pendidikan kewarganegaraan global dalam kurikulum PPKn

di abad 21 yaitu aspek historis, filosofis, visi dan misi, serta tujuan PPKn. Analisis terhadap kurikulum bertujuan untuk mengetahui konteks PPKn sebagai dasar pijakan dan peta jalan pengembangan pendidikan kewarganegaraan global secara sistematis dan terarah.

PPKn dari aspek sejarah perkembangan kurikulum pendidikan Indonesia mengalami perubahan baik dalam aspek struktur materi, tujuan, metode pengajaran, dan nomenklatur atau nama mata pelajaran dalam kurikulum nasional yang pernah berlaku. Nomenklatur PPKn sejak era kemerdekaan sampai reformasi tercatat sebanyak enam kali telah berganti (Murdiono, 2018). Pergantian nomenklatur PPKn dimulai pada Tahun 1957 menggunakan nama kewarganegaraan, Tahun 1968 diberi nama kewargaan negara, Tahun 1975 sampai kurikulum 1984 diubah dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Tahun 1994 berubah nama menjadi PPKn, Tahun 2006 dalam kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diganti dengan nama PKn, dan dalam kurikulum 2013 diterapkan kembali dengan nomenklatur PPKn. Aspek historis perkembangan PPKn dapat ditelusuri secara holistik dari dinamika kurikulum pendidikan Indonesia.

Orientasi pendidikan kewarganegaraan dalam rencana pelajaran Tahun 1947 lebih dititikberatkan dalam pembentukan warga negara yang memiliki patriotisme dan nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Pendidikan kewarganegaraan dilatarbelakangi oleh situasi Negara Indonesia yang baru saja merdeka dari belenggu imperialisme Belanda, sehingga corak pendidikan masih diwarnai dengan kolonial. Struktur materi yang diajarkan berkaitan dengan hukum tata negara yang menekankan pada kewajiban warga negara terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Pendidikan kewarganegaraan pada Tahun 1947 sesuai dengan tujuan pendidikan nasional secara umum yaitu mempersiapkan warga negara sejati yang bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Mata pelajaran *Civics* dengan berisikan materi tentang sejarah nasional, sejarah proklamasi, sejarah UUD NRI Tahun 1945, Pancasila, pembinaan rasa persatuan dan kesatuan, dan pidato-pidato kenegaraan presiden mulai diperkenalkan saat dikeluarkannya dekrit presiden Tahun 1959 (Murdiono, 2018). Pendidikan kewarganegaraan pada Tahun 1947

tidak diajarkan sebagai pengetahuan ilmiah melainkan pada pembentukan warga negara yang cinta terhadap tanah air.

Pendidikan kewarganegaraan dalam rencana pendidikan Tahun 1964 diatur dalam ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 yang memberikan arah tujuan pendidikan nasional untuk membangun patriotisme warga negara dengan mengembangkan semangat Pancasila dan revolusi 1945. Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (TUBAPI) diperkenalkan pada masa penerapan rencana pendidikan Tahun 1964 yang meliputi proses perumusan dan penetapan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 beserta penjelasannya, manifesto politik, pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1960 yang berjudul Jalan Revolusi Kita, pidato Presiden Soekarno dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 30 September 1960 yang berjudul Membangun Dunia Kembali, Manifestasi Politik UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Indonesia, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (Manipol-USDEK), serta amanat pembangunan presiden Tahun 1959. Pendidikan kewarganegaraan dalam rencana pendidikan 1964 difokuskan untuk menanamkan jiwa revolusioner.

Pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum tahun 1968 berorientasi untuk mendidik dan membina warga negara yang baik sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pemerintahan orde baru menetapkan nama mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara dengan struktur materi yang harus memuat tentang Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, ketetapan MPRS, sejarah orde baru, sejarah kebangsaan, geografi, serta materi terkait PBB. Orientasi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum 1975 hampir sama dengan kurikulum 1968, hanya menambahkan materi terkait Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang memperkenalkan penamaan PMP. Nomenklatur mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum 1975 menekankan pada pembentukan manusia pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Murdiono, 2018). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam perkembangannya pada Tahun 1978 dijabarkan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau yang disebut Ekaprasetia Pancakarsa.

Pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Penamaan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tetap dengan nomenklatur PMP. Kurikulum PMP Tahun 1984 menekankan pada pembaharuan kedalaman dan kesesuaian materi dengan perkembangan terbaru. Pemberlakuan kurikulum 1994 didasarkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nomenklatur yang ditetapkan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam kurikulum 1994 yaitu PPKn. PPKn dalam kurikulum 1994 berorientasi untuk melatih dan membina peserta didik agar menjadi warga negara yang terlibat aktif dalam kegiatan di masyarakat. Materi PPKn dalam kurikulum 1994 tidak jauh berbeda dengan materi yang terdapat dalam PMP, hanya ada beberapa penambahan materi yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan (Murdiono, 2018). Muatan materi PPKn dalam kurikulum 1994 memperjelas kajian moral Pancasila dalam kurikulum PMP 1984.

Nomenklatur PPKn dalam (KTSP) Tahun 2006 diubah menjadi PKn. Orientasi PKn dalam kurikulum 2006 menitikberatkan pada pembentukan warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sehingga mampu menjalankan hak dan kewajibannya. Ruang lingkup PKn yang dikembangkan yaitu norma, peraturan hukum, persatuan dan kesatuan, hak asasi manusia, konstitusi, Pancasila, politik dan kekuasaan, kebutuhan warga negara, serta globalisasi (Murdiono, 2018). Nomenklatur PKn kembali diubah menjadi PPKn dalam kurikulum 2013. Berlakunya kurikulum 2013 sebagai upaya untuk mengakomodasi perkembangan terbaru dan perwujudan pendidikan sebagai proses pencerdasan kehidupan bangsa dalam arti yang utuh dan luas. Ruang lingkup materi PPKn dalam kurikulum 2013 meliputi peran dan kedudukan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, NKRI sebagai bentuk final Negara Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud semboyan dan filosofi kesatuan yang melandasi keberagaman Indonesia (Suyato & Arpanudin, 2018). Nama mata pelajaran PKn dalam kurikulum sebelumnya dikemas

menjadi PPKn untuk memperluas substansi dan menyesuaikan dengan perkembangan terbaru.

PPKn dalam kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2006. Penyempurnaan kurikulum 2013 dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa (a) Pancasila sebagai dasar negara maupun pandangan hidup bangsa harus dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan sumber rujukan dari keseluruhan ruang lingkup materi, serta (b) menempatkan makna dan substansi UUD NRI Tahun 1945, komitmen dalam bingkai NKRI, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian integral dari PPKn yang menjadi wahana psikologis maupun pedagogis pembangunan karakter Pancasila (Suyato & Arpanudin, 2018). PPKn secara metodologi dalam kurikulum 2006 belum mengembangkan secara utuh dan optimal pengembangan ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Penyempurnaan PPKn menjadi PPKn dalam kurikulum 2013 yaitu didasarkan atas masukan bahwa muatan nilai Pancasila kurang mendapat ruang yang proporsional karena secara substansial PPKn 2006 terkesan lebih dominan bermuatan ketatanegaraan.

Istilah dan struktur materi kewarganegaraan global berdasarkan tinjauan historis kurikulum pendidikan nasional yang pernah berlaku di Indonesia belum dikembangkan secara luas dan utuh dalam konteks kurikulum PPKn. Struktur pendidikan kewarganegaraan global bahkan belum ada dalam pemberlakuan kurikulum baru, hanya saja dalam kurikulum Tahun 2006 merumuskan salah satu ruang lingkup materi tentang globalisasi. Pendidikan kewarganegaraan global secara substansial dalam sejarah perkembangan kurikulum PPKn belum pernah menjadi mata pelajaran ataupun disajikan sebagai ruang lingkup materi secara koheren dan mandiri. Hal ini bertolak belakang dengan fungsi dan kedudukan PPKn yang memiliki peran strategis untuk mendidik dan membina siswa agar mampu menjadi warga global yang cerdas, bertanggung jawab dan demokratis (Arif & Aulia, 2016). Konsep pendidikan kewarganegaraan global masih jarang ditemui dalam praktik PPKn di setiap jenjang pendidikan.

PPKn idealnya harus terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman termasuk dalam mengkaji perkembangan pendidikan

kewarganegaraan skala global. Perubahan dan dinamika yang terjadi dalam skala global menjadi bagian dari bahan kajian PPKn yang penting untuk dikembangkan (Murdiono, 2018). Perubahan atau pengembangan kurikulum pada umumnya dilakukan karena adanya tantangan dan tuntutan perubahan dalam masyarakat. Peserta didik harus memiliki kompetensi dalam menghadapi tantangan-tantangan global di masa depan. Peserta didik pada realitasnya akan dihadapkan pada perubahan yang cepat dan tantangan yang berat sehingga menuntut dilakukannya perubahan kurikulum agar relevan dengan tuntutan masa depan.

PPKn jika ditinjau dari aspek filosofis meliputi kajian ontologis, epistemologi, dan aksiologi. PPKn dalam kajian ontologis meliputi dua dimensi yaitu objek telaah dan pengembangan. Aspek ontologis objek telaah merupakan dasar dan orientasi PPKn sebagai bidang kajian ilmiah untuk mengembangkan struktur pengetahuan, sedangkan objek pengembangan merupakan dasar dan orientasi dalam melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran untuk mencapai tujuan mewujudkan warga negara yang cerdas, demokratis, religius, dan berkeadaban (Winataputra, 2001). PPKn dalam kajian epistemologis mencakup metodologi penelitian dan pengembangan. Metodologi penelitian digunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, sedangkan metodologi pengembangan digunakan untuk mendapatkan paradigma pedagogis dan rekayasa kurikuler. PPKn dalam kajian aksiologis memuat manfaat dari hasil penelitian dan pengembangan bidang kajian yang telah dicapai bagi dunia pendidikan. PPKn dalam tinjauan aspek filosofis terbuka dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan global.

Pendidikan kewarganegaraan global secara aksiologis relevan dijadikan sebagai kajian baru kurikulum untuk mengembangkan struktur pengetahuan PPKn di abad 21. PPKn sebagai bidang keilmuan yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari warga negara dalam berbangsa dan bernegara tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan global yang mempengaruhi kehidupan manusia (Yusof dkk., 2019). Isu-isu dan permasalahan global telah menjadi tuntutan dan tantangan segala aspek kehidupan. Pengembangan pendidikan kewarganegaraan global dalam kurikulum PPKn di abad 21

sangat penting dikembangkan jika ditinjau dari aspek ontologis yaitu perspektif hakikat. Pengembangan pendidikan kewarganegaraan global secara epistemologi melalui metodologi penelitian akan melahirkan pengetahuan baru. Pengembangan pendidikan kewarganegaraan global secara aksiologis dilihat dari perspektif kebermanfaatannya akan berguna dan bermanfaat karena pembelajaran PPKn dituntut menjadikan peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memenuhi tantangan abad 21.

Relevansi PPKn dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan global juga dapat ditinjau dari visi, misi, serta tujuannya. Visi dan misi PPKn koheren dan konsisten dengan esensi dan arah filosofi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang diatur dalam konstitusi. Visi PPKn secara kultural dan sosio politik bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu menumbuh kembangkan *civic intelligence* atau kecerdasan kewarganegaraan (Winataputra, 2001). Visi PPKn erat kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan global. Hal ini dikarenakan kecerdasan kewarganegaraan di abad 21 tentu tidak hanya meliputi wawasan lokal dan nasional, melainkan dalam arti lebih luas mencakup wawasan global (Franch, 2019). Pengembangan pendidikan kewarganegaraan global sejalan dengan visi PPKn untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

PPKn mengemban misi yang bersifat multidimensional karena bertitik tolak dari visinya. PPKn memiliki beberapa misi yaitu (a) misi psikopedagogis untuk mengembangkan potensi peserta didik secara progresif dan berkelanjutan, (b) misi psikososial untuk memfasilitasi kematangan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara, serta (c) misi sosiokultural untuk membangun budaya dan keadaban kewarganegaraan (Winataputra, 2001). Pengembangan kurikulum PPKn dari berbagai kajian keilmuan dijadikan sebagai misi seperti pendidikan demokrasi dan politik, pendidikan anti korupsi, pendidikan hak asasi manusia, dan pendidikan karakter. Pengembangan pendidikan kewarganegaraan global dalam kurikulum pendidikan relevan sebagai misi PPKn di abad 21 untuk menghadapi tantangan dan permasalahan kompleks dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara baik lokal, nasional, maupun global.

PPKn baik dalam konteks kajian akademik, kurikuler, maupun sosio-kultural pada prinsipnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Warga negara yang baik dapat diartikan sebagai warga negara yang memiliki berbagai kompetensi sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat (Arif & Aulia, 2016). Warga negara yang baik harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan. Relevansi tujuan PPKn dengan pengembangan pendidikan kewarganegaraan global dapat ditinjau dalam perspektif yang lebih luas bahwa dalam membentuk warga negara yang baik tidak hanya sekedar dalam konteks nasional melainkan juga dalam konteks global (Murdiono, 2018). Warga negara dalam konteks global harus memiliki wawasan luas, bertanggungjawab secara etika, bersikap baik dalam keberagaman, serta berketerampilan dengan terlibat aktif dalam masalah-masalah global (Fernekes, 2016). Tujuan PPKn dalam tuntutan abad 21 tidak hanya cukup untuk membentuk warga negara nasional yang baik, tetapi sekaligus membentuk warga global yang baik.

### **Kerangka Konseptual Kompetensi Kewarganegaraan Global dalam Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Pengembangan pendidikan kewarganegaraan global pada hakikatnya merupakan penguatan praksis PPKn. Pengembangan pendidikan kewarganegaraan global merupakan suatu upaya penguatan prinsip-prinsip pedagogi PPKn. Prinsip-prinsip pedagogi sangat esensial sebagai landasan pengembangan suatu pembelajaran. Prinsip-prinsip pedagogi PPKn dikembangkan oleh UNESCO untuk menghadapi tantangan global. UNESCO mendorong terjadinya proses belajar yang transformatif sehingga memandang perlu adanya pedagogi transformatif (Pasandaran, 2015). UNESCO dalam kaitannya dengan pedagogi transformatif mengemukakan prinsip-prinsip pendidikan kewarganegaraan global. Pendidikan kewarganegaraan global sebagai pedagogi transformatif relevan untuk dikembangkan dalam upaya memperkuat praksis PPKn di abad 21.

Pengembangan kerangka konseptual kompetensi kewarganegaraan global yang relevan untuk penguatan praksis PPKn di abad 21 meliputi beberapa prinsip yaitu *holism*,

*critical thinking*, *value formation*, dan *dialogue*. Prinsip *holism* diartikan bahwa pedagogik PPKn harus berpusat pada siswa dan mampu menumbuhkan kesadaran terkait tantangan-tantangan yang dihadapi baik lokal, nasional, regional, maupun global sehingga dapat memunculkan kepedulian serta tanggung jawab kolektif terhadap kehidupan bersama. Prinsip *critical thinking* diartikan bahwa PPKn harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan solutif berorientasi pada pemecahan masalah. Prinsip *value formation* diartikan bahwa PPKn harus mendorong pengakuan terhadap nilai-nilai yang menjadi akar budaya, serta kebijakan nasional dan internasional. Prinsip *dialogue* diartikan bahwa pedagogik PPKn harus mendorong sikap terbuka siswa terhadap berbagai ide dan gagasan baru untuk menumbuhkan kepedulian terhadap orang lain, sikap demokratis, dan sikap partisipatif (Murdiono, 2018). Pengembangan kerangka konseptual kompetensi kewarganegaraan global harus mencakup semua prinsip-prinsip untuk memperkuat kurikulum PPKn di abad 21.

Pengembangan pendidikan kewarganegaraan global dalam kurikulum PPKn dapat merujuk pada pendekatan-pendekatan dan hasil kajian kurikulum dari UNESCO. Kurikulum internasional kewarganegaraan global yang dirumuskan UNESCO secara substansial mengandung dua prinsip utama yaitu setiap orang menjadi bagian dari komunitas manusia, serta identitas dan hubungan setiap orang akan meluas dari lokal, nasional menjadi global (Larkin, 2018). Pendekatan yang dikembangkan oleh UNESCO sebagai konstruksi konseptual inti pendidikan kewarganegaraan global yaitu (a) tema global mencakup komunitas global, masalah global, dan perdamaian sebagai tujuan pendidikan kewarganegaraan global, (b) tema kewarganegaraan meliputi sikap, nilai-nilai dan kepercayaan, berpikir kritis, partisipasi, keterlibatan, dan tindakan, serta (c) tema pendidikan mencakup dua komponen utama sebagai pedoman untuk pengajaran dan pembelajaran, sekaligus meningkatkan kompetensi warga dunia dengan berpendekatan implementasi (Toukan, 2018). Pengembangan kerangka konsep pendidikan kewarganegaraan global dalam pendekatan UNESCO bertujuan membekali peserta didik dalam menghadapi tantangan abad 21 baik pada tingkat lokal maupun global.

Pengembangan kerangka konseptual pendidikan kewarganegaraan global dalam kurikulum PPKn dapat juga merujuk pada kerangka konseptual kompetensi yang dikembangkan oleh Oxfam. Pengembangan pendidikan kewarganegaraan global yang dirumuskan Oxfam meliputi tiga unsur mutlak yaitu pemahaman atau pengetahuan, sikap dan nilai, serta dan keterampilan (Murdiono, Suharno, & Wuryandani, 2020). Aspek pengetahuan dan pemahaman berkaitan dengan kompetensi wawasan global. Konsep wawasan global merujuk pada peran serta warga negara dalam konteks global (Arif & Aulia, 2016). Pemahaman global meliputi lima aspek yaitu kejujuran dan keadilan sosial, keberagaman, saling ketergantungan, pembangunan yang berkelanjutan, serta konflik dan perdamaian. Kompetensi pengetahuan global dipahami sebagai kemampuan yang memiliki pemikiran terbuka serta berupaya aktif dalam memahami setiap norma budaya yang berbeda dalam skala global.

Warga negara yang menguasai pemahaman global dapat bekerja secara efektif, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Kerangka konseptual kompetensi pengetahuan kewarganegaraan global meliputi (a) memahami masyarakat, sistem dan sejarah, kekuasaan dan struktur, hubungan sosial, penindasan dan ketidakadilan, (b) tindakan reflektif memahami interaksi antara kekuasaan, budaya dan transformasi, serta (c) menggunakan pengetahuan sebagai kekuatan sosial dengan menentukan cara untuk mempengaruhi masyarakat dan keadilan (Isaacs, 2018). Pengetahuan global yang dibentuk secara substansi bertujuan agar peserta didik memandang hubungan antar warga negara dalam konteks nasional dan internasional (Arif & Aulia, 2016). Terbentuknya wawasan global dapat dilihat dari cara pandang warga negara terhadap dunia yang dibedakan menjadi beberapa kelompok yaitu egosentris, ideosentris, sosiosentris, multisentris, dan geosentris (Gerzon, 2010). Klasifikasi pemahaman global harus dijadikan pertimbangan dan kajian orientasi dalam perumusan kerangka konseptual kompetensi pendidikan kewarganegaraan global.

Karakter kewarganegaraan global dapat ditinjau dari aspek nilai dan sikap. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan global mengembangkan nilai dan sikap yaitu rasa akan identitas diri, rasa empati dan kemanusiaan, komitmen terhadap kejujuran dan keadilan

sosial, menghormati perbedaan, kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan, komitmen pada pembangunan yang berkelanjutan, serta keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan hal yang berbeda (Murdiono, Suharno, & Wuryandani, 2020) respect for diversity, environmental care and sustainable development, globalization and interdependence, peace and conflict, critical thinking, ability to argue critically, ability to tackle injustice and inequalities, respect for others, cooperation and conflict resolution, sense of identity and self-esteem, empathy and sense of humanity, respect for diversity, inequalities and social justice, caring, personal responsibility, global interconnectedness, self-awareness, intercultural communication, and global insight; (2. Aspek keterampilan global berkaitan dengan cara memainkan peran secara efektif dalam kehidupan global. Keterampilan-keterampilan global yang harus dimiliki setiap individu antara lain kemampuan berpendapat, kemampuan untuk berpikir kritis, kemampuan menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ketidakadilan dan ketidaksetaraan, menghormati dan menghargai orang lain, kerja sama, serta kemampuan menyelesaikan konflik (Yusof dkk., 2019). Peserta didik wajib mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan global agar menjadi warga global yang baik.

Pendekatan dan hasil kajian yang dijadikan rujukan dalam pengembangan kewarganegaraan global dalam kurikulum PPKn abad 21 harus sesuai dengan karakteristik, tujuan, dan visi kewarganegaraan nasional Indonesia. Kurikulum PPKn dalam mengembangkan kewarganegaraan global harus berdasarkan tuntutan agar generasi muda memiliki keterampilan abad 21 yang dikenal dengan *critical thinking, communication, collaboration, dan creativity* (4Cs). Karakteristik warga global di abad 21 meliputi kemampuan menyelesaikan masalah tanpa menggunakan kekerasan, menerima tanggung jawab dan bekerja sama secara kooperatif, menghargai, menerima dan memahami keragaman budaya, berpikir sistematis dan kritis, menghilangkan kebiasaan konsumtif, melindungi hak asasi manusia dan memiliki sikap sensitif, serta berpartisipasi dalam politik baik pada tingkat lokal, nasional, dan global (Cogan, 1998). Pengembangan kewarganegaraan global melalui kurikulum PPKn bertujuan agar peserta didik memiliki pengetahuan dan pemahaman, nilai dan sikap,

serta keterampilan untuk menjawab tantangan serta permasalahan abad 21.

## SIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan global secara substansial bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik yang memahami dunia kontemporer, berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan nasional dan global, serta mampu menjadi agen yang berkontribusi untuk menciptakan dunia yang damai, aman, adil, toleran, inklusif, dan berkelanjutan. PPKn dalam konteks Indonesia belum memuat materi pendidikan kewarganegaraan global. PPKn dalam konteks Indonesia tidak sesuai dengan perannya dalam mendidik dan membina siswa menjadi warga negara global yang cerdas, bertanggung jawab dan demokratis. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan global urgen untuk dimasukkan ke dalam kurikulum PPKn. Kerangka konseptual kewarganegaraan global dalam kurikulum PPKn harus memuat tiga unsur yaitu (a) pengetahuan dan pemahaman global meliputi keadilan sosial, keragaman, globalisasi pembangunan berkelanjutan, perdamaian dan konflik, (b) sikap dan nilai meliputi rasa akan identitas diri, empati dan kemanusiaan, kejujuran dan keadilan sosial, menghormati perbedaan, kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan, komitmen pada pembangunan yang berkelanjutan, keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan hal yang berbeda, serta (c) keterampilan berpendapat, berpikir kritis, menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ketidakadilan dan ketidaksetaraan, menghormati dan menghargai orang lain, kerja sama, dan menyelesaikan konflik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arif, D. B., & Aulia, S. S. (2016). *Kewargaan Digital, Penguatan Wawasan Global Warga Negara, dan Peran PPKn*. Bandung: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.
- Banks, J. A. (2014). Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age. *Journal of Education, 194*(3), 1-12.
- Chong, E. K. M. (2015). Global Citizenship Education and Hong Kong's Secondary School Curriculum Guidelines. *Asian Education and Development Studies, 4*(2), 221-247.

- Cogan, J. J. (1998). *Citizenship Education for The 21st Century: Setting The Context*. London: Kogan Page Limited.
- Cotton, D. R. E., Morrison, D., Magne, P., Payne, S., & Heffernan, T. (2019). Global Citizenship and Cross-Cultural Competency: Student and Expert Understandings of Internationalization Terminology. *Journal of Studies in International Education*, 23(3), 346-364.
- Davids, N. (2018). *Global Citizenship Education, Postcolonial Identities, and a Moral Imagination*. London: Palgrave Macmillan.
- Davies, I. & Ross, A. (2018). *Europe and Global Citizenship*. London: Palgrave Macmillan.
- Eten, S. (2015). The Prospects of Development Education in African Countries: Building a Critical Mass of Citizenry for Civic Engagement. *Policy and Practice: A Development Education Review*, 20(3), 136-151.
- Exposito, P. L., & McCowan, T. (2013). Editorial: Citizenship and Education in Latin America. *Journal of Social Science Education*, 12(3), 2-7.
- Fernekes, W. R. (2016). Global Citizenship Education and Human Right Education: Are They Compatible with U.S. Civic Education?. *Journal of International Social Studies*, 6(2), 34-57.
- Franch, S. (2019). *Global Citizenship Education Between Qualification, Socialization, and Subjectification*. London: Palgrave Macmillan.
- Gerzon, M. (2010). *Global Citizens: How Our Vision of the World is Outdated, and What We Can Do About it*. London: Ebury Digital.
- Ho, L. (2018). *Conceptions of Global Citizenship Education in East and Southeast Asia*. London: Palgrave Macmillan.
- Isaacs, T. I. (2018). *Internationalism in Global Citizenship and Educations*. London: Palgrave Macmillan.
- Karsten, S., Kubow, P., & Matrai, Z. (1998). *Challenge facing the 21<sup>st</sup> Century Citizen: Views of Policy Makers*. London: Kogan Page Limited.
- Kiwan, D. (2018). *The Middle East*. London: Palgrave Macmillan.
- Larkin, A. (2018). *Seeking Global Citizenship Through International Experiential/Service Learning and Global Citizenship Education: Challenges of Power, Knowledge and Difference for Practitioners*. London: Palgrave Macmillan.
- Mansouri, F., Johns, A., & Marotta, V. (2017). Critical Global Citizenship: Contextualising Globalisation. *Journal of Citizenship and Globalisation Studies*, 1(2), 1-9.
- Murdiono, M. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan Global: Membangun Kompetensi Global Warga Negara Muda*. Yogyakarta: UNY Press.
- Murdiono, M., Suharno, & Wuryandani, W. (2020). Global Citizenship Values in the Student's Book of Pancasila and Civic Education. *Advance in Social Science, Education and Humanities Research*, 401(1), 169-175.
- Nanggala, A., & Malihah, E. (2020). Peran Tradisi Irung-Irung dalam Memperkuat Civic Engagement Generasi Muda di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 1-16.
- Pasandaran, S. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Menyiapkan Generasi Emas Indonesia*. Bandung: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.
- Pashby, K. (2018). *Identity, Belonging, and Diversity in Education for Global Citizenship: Multiplying, Intersecting, Transforming, and Engaging Lived Realities*. London: Palgrave Macmillan.
- Peterson, A., Milligan, A., & Wood, B. E. (2018). *Global Citizenship Education in Australasia*. London: Palgrave Macmillan.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954.
- Soong, H. (2018). *Transnationalism in Education: Theoretical Discussions and the Implications for Teaching Global Citizenship Education*. London: Palgrave Macmillan.
- Sundaram, V. (2018). *Gender, Sexuality and Global Citizenship Education: Addressing the Role of Higher Education in Tackling Sexual Harassment and Violence*. London: Palgrave Macmillan.

- Sutrisno, Sapriya, Komalasari, K., & Rahmad. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Proyek Warga Global dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 155-164.
- Suyato, & Arpanudin, I. (2018). *Penilaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Titus, C. (1994). *Civic Education for Global Understanding*. London: Eric Digests.
- Toukan, E.V. (2018). Educating Citizens of the Global: Mapping Textual Constructs of UNESCO's Global Citizenship Education 2012-2015. *Education, Citizenship and Social Justice*, 13(1), 51-64.
- Wibowo, A. P., & Wahono, M. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: Usaha Konkret untuk Memperkuat Multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 198-202.
- Winataputra, U. S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistem Pendidikan Demokrasi*. Bandung: Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Winataputra, U. S. (2014). *Diskursus Aktual tentang Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam Konteks Kurikulum 2013*. Surakarta: AP3KNI & Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Yusof, H., Noor, M. A. M., Mansor, M., & Yunus, J. (2019). Knowledge, Skills, and Attitudes of Malaysian Student on Global Citizenship Education. *Cakrawala Pendidikan*, 38(3), 426-437.